



Pembinaan,Supervisi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik OPD dan Kabupaten/kota

No. SK :

Persyaratan

1. OPD yang akan berkonsultasi,langsung mendatangi Petugas pada Biro Organisasi
2. OPD bisa langsung telpon melalui Handphone dan whatsapple
3. Bagi Kabupaten/Kota se Sumbar bisa mendatangi langsung Biro Organisasi, lewat WA , telpon dan Group Tatalaksana
4. Membuat surat pemberitahuan ke Biro Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sama dengan persyaratan

Waktu Penyelesaian



6 Bulan

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dijabarkan di daerah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan selaras dengan Uraian Tugas dari Biro Organisasi, maka Biro Organisasi menyelenggarakan Pembinaan Pelayanan Publik bagi OPD dan kabupaten/kota se Sumatera Barat. OPD yang dimaksud berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya yang langsung bersentuhan dengan layanan publik, yakni RSUD/RSJ/DPMPTSP, Disdukcapil, Bakeuda dan 18 Samsat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup,dll. Sedangkan pembinaan kepada Kabupaten/kota meliputi 19 Kabupaten/kota se Sumbar.

Jenis - jenis pembinaan yang dilakukan antara lain :

1. Pembinaan terhadap Admin dan Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR, termasuk laporan pengelolaan secara periodik
2. Pembinaan SIPP
3. Pembinaan Survey Kepuasan masyarakat
4. Bimtek / Rakor Pelayanan Publik
5. Forkompanda
6. Evaluasi pelayanan publik pada 7 Kabupaten/Kota se Sumbar
7. Hub jaringan Informasi Pelayanan Publik
8. Penyusunan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional / Sinovik, dan Bimtek Penyusunan Proposal yang baik
9. Pemberian username dan password admin untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional
10. Pembuatan produk hukum bidang./ sektor pelayanan publik untuk Pemda Provinsi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Sekretariat Daerah

Produk Pelayanan

1. Pembinaan pelayanan publik

Pengaduan Layanan

menampung pengaduan masyarakat di sektor pelayanan publik dan menyalurkannya pada OPD terkait, terutama pada aplikasi SP4N-LAPOR!